

**AFILIASI POLITIK SUKU JAWA DALAM PILKADA NAGAN
RAYA 2017**

(Studi Kasus Di Desa Kuala Trang)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Novita Gustian Ningsih
NIM. 140305038
Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya,

Nama : Novita Gustian Ningsih

NIM : 140305038

Jenjang : Strata (S-I)

Jurusan : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Meja Aceh, 01 Agustus 2018



NOVITA GUSTIAN NINGSIH
NIM. 140305038

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

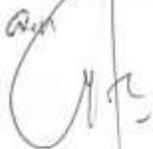
Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

NOVITA GUSTIAN NINGSIH
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama
NIM: 140305038

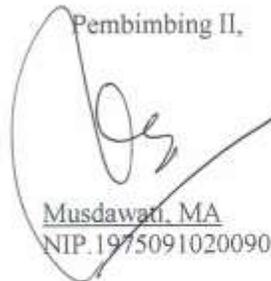
Diajukan Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Sahlan, M.Si
NIP.197710242006041003

Pembimbing II,



Musdawan, MA
NIP.197509102009012002

LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/tanggal: Jum'at, 10 Agustus 2018 M
28 Dzulkaidah 1439 H

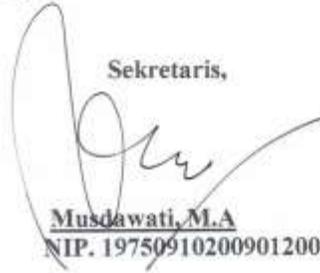
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, S. Pd. I., M.Ag
NIP. 19790508200604100

Sekretaris,



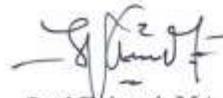
Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

Anggota I,



Dr. Firdaus, M.Hum, M.Si
NIP. 197707042007011023

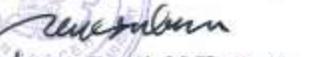
Anggota II,



Suci Fajarni, MA
NIP. 19910330201812003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

**Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017
(Studi Kasus di Desa Kuala Trang)**

Nama : Novita Gustian Ningsih
Nim : 140305038
Pembimbing I : Muhammad Sahlan, M. Si
Pembimbing II : Musdawati, MA

ABSTRAK

Pilkada merupakan salah satu peristiwa politik yang diselenggarakan dalam sistem politik Indonesia, didalamnya semua warga negara tanpa memandang batasan etnis, ras, suku ataupun agama berhak untuk ikut berpartisipasi melalui pemberian dukungan pada salah satu pasangan calon. Dukungan ini merupakan bentuk dari afiliasi politik seorang individu kepada calon yang dia percayai. Masyarakat Desa Kuala Trang yang mayoritasnya suku Jawa memiliki kecenderungan atau mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota (Afiliasi Politik) dalam memilih salah satu kandidat dari partai yang mencalonkan sebagai pemerintah daerah di Nagan Raya. Masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Afiliasi politik suku Jawa dalam pilkada Nagan Raya 2017 dan apa yang mempengaruhi terjadinya afiliasi politik terhadap partai atau calon peserta pilkada.

Adapun tujuan dan manfaat daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui Afiliasi politik suku Jawa dalam pilkada Nagan Raya 2017 dan faktor yang mempengaruhi terjadinya afiliasi politik terhadap partai atau calon peserta pilkada. Sedangkan manfaat dari penelitian adalah untuk memberikan kontribusi tentang seberapa jauh kesadaran masyarakat dalam kanvas perpolitikan di Nagan Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tetap desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Kuala Trang memberikan dukungan yang kuat dan sepenuhnya kepada pasangan H.M. Jamin Idham-Calidin dari Partai Aceh dengan cara membentuk tim sukses dalam dukungan seperti kampanye dan lain sebagainya agar partai tersebut dapat memenangkan pilkada di tahun 2017, karena pasangan ini sangat dekat dengan masyarakat suku Jawa dan nanti akan memperdulikan masyarakat suku Jawa dari berbagai sektor.

Kata Kunci: Afiliasi, Politik, Suku Jawa, Pilkada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagran Raya 2017 (Studi Kasus di Desa Kuala Trang)”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Sahlan, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Musdawati, MA selaku pembimbing II, yang telah menyisihkan waktu untuk membina, membimbing dan mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Drs. Fuadi, M.Hum Tahun beserta jajarannya yang telah menjaga amanahnya dalam memimpin Fakultas Ushulud din dan Filsafat.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai Ketua Prodi Sosiologi Agama, Bapak Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si sebagai sekretaris Jurusan Sosiologi Agama, serta seluruh dosen khususnya Prodi Sosiologi Agama yang telah banyak memberi arahan dan nasehatnya kepada penulis.

4. Kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan perpustakaan UIN Ar-raniry beserta stafnya atas bantuan meminjamkan buku yang penulis butuhkan.
5. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Agusmanto dan Ibunda Riyanti tercinta yang dengan tulus dan ikhlas mengasuh, membesarkan dan mendidik ananda dengan segala kerendahan hati, dan bersusahpayah membanting tulang melawan hujan dan terik panas matahari demi untuk kesuksesan ananda. Terimakasih ananda ucapkan atas kasih sayang dan dukungan serta do'a yang tak pernah berhenti untuk ananda dalam meraih cita-cita. Selanjutnya terimakasih kepada Adik Nova Tantryanti atas bantuan dukungan baik moril dan materil serta motivasinya kepada ananda dalam bidang pendidikan selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
6. Aparatur Desa Kuala Trang beserta jajarannya, dan masyarakat Desa Kuala Trang yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan.
7. Sahabat-sahabat penulis Ulfa Ladaiya, Desi Fadilla, Farah Fauzul Jumaida, Fita Mariska. yang telah setia menemani hari-hari dengan mendengarkan keluh kesah, dorongan, semangat, serta masukan yang di berikan kepada penulis. Selanjutnya teman-teman leting 2014 Unit 1, 2 dan 3 yang telah mengisihari-hari penulis dalam proses perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kawan-kawan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Desa Seunebok Padang Kecamatan Teunom yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terimakasih atas semua yang membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak, demi peningkatan dari skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Penulis

Novita Gustian Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
PERNYATAAN KEASLIAN	i	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Defenisi Operasional	7
	F. Kajian Pustaka	11
	G. Metode Penelitian	13
BAB II	KAJIAN TEORI	
	A. Afiliasi Politik	18
	B. Teori Patron-Klien	20
	C. Pendekatan Sosiologis	22
	D. Partai Politik	23
	E. Strategi Politik	27
	F. Pergeseran Nilai-nilai Politik.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	33
	1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
	2. Lokasi Penelitian	34
	3. Sumber Data	34
	4. Teknik Pengumpulan Data	34
	5. Teknik Analisis Data	36
	6. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya.....	38
	1. Kondisi Geografis	38
	2. Tata Kelola Pemerintahan.....	39
	3. Kependudukan dan Tenaga Kerja.....	41
	B. Budaya Politik Suku Jawa	42
	C. Pandangan Budaya Politik Suku Jawa dalam Melihat Kekuasaan.....	46

D. Afiliasi Suku Jawa dalam Pilkada 2017	47
E. Afiliasi Politik terhadap Partai atau Calon Peserta Pilkada 2017	49
F. Faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Afiliasi Politik.....	51
G. Afiliasi Suku Jawa dengan Pasangan H.M. Jamin Idham- Chalidin.....	54
H. Hasil Pilkada Kabupaten Nagan Raya 2017	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat.

Perubahan format Pilkada setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 telah mengakhiri pengaruh Pemerintah Pusat yang dominan. Pilkada langsung dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi dalam mengajarkan masyarakat untuk melihat dan berpikir secara objektif terhadap fenomena politik di tingkat daerah, sehingga masyarakat tidak semata-mata terfokus pada pola pikir dan perilaku politik para elite politik yang berkompetisi dalam Pilkada.¹

Pilkada langsung dilaksan akan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Gubernur ,Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”². Makna demokratis bias menimbulkan makna ganda, bias

¹Fidel Ali Permana, *Pilkada Demokrasi Tidak Mesti Langsung*, Media Indonesia, 31 Agustus 2009

²Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4

dipilih langsung oleh rakyat serta bias juga dipilih langsung oleh anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Menurut Joko J. Prihatmoko Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukung nya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.³

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkuat bangunan demokrasi secara nasional. Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada sebagai demokrasi lokal adalah upaya untuk mewujudkan *Local Accountability*, *Political Equity*, dan *Local Responsiveness*, yang merupakan tujuan dari desentralisasi.⁴

Hasil Pilkada adalah tampilnya seorang pejabat publik yang dimiliki oleh rakyat tanpa membedakan dari mana asal dan usul keberadaannya karena dia telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. Siapapun yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai Kepala Daerah (*localexecutive*) yang memiliki *legalauthority ofpower* (territorial kekuasaan yang jelas), *local own income and distribute them for people*

³Joko J. Prihatmoko, "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Semarang, 2000), hal. 109

⁴FadillahPutra. "*Partai Politik dan Kebijakan Publik*." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 11

welfare (memiliki pendapatan daerah untuk didistribusikan bagi kesejahteraan penduduk), dan *local representative asbalance power for controlling local executive* (lembaga perwakilan rakyat sebagai pengontrol eksekutif daerah).

Demokrasi dalam praktek bernegara dewasa ini, semakin mengalami puncak perkembangannya, dimana demokrasi dalam pengertian yang sederhana, sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat begitu gencar melanda setiap Negara. Bahkan saat ini telah terjadi kecenderungan global dimana demokrasi tidak sekedar menjadi wacana intelektual (Intellectual discourse) melainkan juga impian politik berbagai Negara, khususnya Negara-negara berkembang. Hal ini mensyaratkan diakuinya suatu Negara dalam pergaulan internasional terletak pada pengakuannya akan demokrasi.

Mirriam Budiardjo menyatakan: “secara etimologis demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” yang berarti rakyat, “*kratein*” atau “*krator*” yang berarti kekuasaan/berkuasa. Jadi demokrasi artinya “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi maka terjaminlah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara.⁵

⁵Muhammad Alim, “*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*”, (Yogyakarta: UII Press 2001). Hal.56-58

Dalam kajian politik, partisipasi politik merupakan tema yang banyak menarik perhatian para peneliti. Tema ini mengkaji keterlibatan individu dalam pemilu, partisipasi politik tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan kepartaian. Memilih partai merupakan bentuk partisipasi politik yang paling lazim dibandingkan aktivitas-aktivitas politik lainnya. Memilih dalam pemilu tidak mensyaratkan kemampuan-kemampuan khusus pada individu. Setiap warga Negara yang berusia 17 tahun ke atas, sehat mental, dan tidak sedang dicabut hak politiknya di bawah hukum, berhak menyampaikan aspirasi dengan memilih partai, anggota legislatif, pemimpin daerah, dan presiden.

Memilih partai adalah proses yang disadari. Sebelum memilih partai politik, individu menyadari berbagai keinginan yang baik atau menurutnya penting. Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber-sumber kepercayaannya, partai tertentu mampu mewujudkan keinginan individu melalui kebijakan politik. Situasi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut

Hurwiz mengatakan bahwa keterikatan individu pada partai tertentu (sikap partisan) melibatkan aspek kognitif (keyakinan), efektif (evaluasi), perilaku dan perangkat motivasi psikologis yang mendukung sikap partisan.⁶ Oleh karena itu, individu yang berafiliasi dengan suatu partai tentu memiliki keyakinan terhadap karakteristik partai itu, memiliki opini evaluatif tentang perasaannya terhadap partai, perilaku tertentu yang

⁶Muhammad Alim, "*Demokrasi dan Hak*, ... hal. 55

mengekspresikan sikap partisannya, dan keselarasan sikap partisan dengan sikap-sikap individu pada hal-hal lain.

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten dari Barat Selatan yang berdiri berdasarkan UU No 4 tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Aceh Barat. Nagan Raya merupakan daerah sentral yang banyak penduduknya, salah satu penduduk yang banyak tersebar di daerah Kabupaten Nagan Raya adalah dari suku Jawa. Masyarakat Jawa dan masyarakat Aceh hidup berdampingan dengan baik pasca konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁷Salah satu daerah yang hidup berdampingan antara suku Jawa dan Aceh yaitu Kecamatan Kuala Pesisir, Desa Kuala Trang.

Partisipasi dalam politik Kabupaten Nagan Raya cukup berpengaruh, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam politik kabupaten Nagan Raya semakin meningkat disebabkan banyaknya partai-partai yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan politik aliran semakin kuat berkembang di Nagan Raya. Ketika politik itu mengakar dengan basis masyarakat maka politik itu dianggap dekat dengan rakyat. Masyarakat Desa Kuala Trang yang penduduknya banyak dari suku Jawa juga ikut berpartisipasi dalam politik pemilihan kepala daerah tahun 2017, masyarakat Desa Kuala Trang memiliki kecenderungan atau mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota (Afiliasi Politik) dalam memilih salah satu kandidat dari partai yang mencalonkan sebagai pemerintah daerah di Nagan Raya.

⁷Wawancara dengan Hartono Anggoya Tuha Peut desa Kuala Trang, pada 05 Juni 2018

Dalam dukungannya atau partisipasi politik dalam pemilihan pilkada tahun 2017 masyarakat Desa Kuala Trang cenderung memilih calon kandidat dari Partai Aceh (PA), masyarakat Desa Kuala Trang memberikan dukungan yang kuat dan sepenuhnya kepada partai tersebut dengan cara membentuk tim sukses dalam dukungan seperti kampanye dan lain sebagainya agar partai tersebut dapat memenangkan pilkada di tahun 2017.⁸

Afiliasi politik masyarakat Desa Kuala Trang dalam mendukung kandidat dari Partai Aceh (PA) memberikan suara yang tinggi dalam pemilihan pilkada tahun 2017 sehingga memenangkan kandidat dari Partai Aceh (PA) sebagai pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam periode lima tahun kedepan.

Dengan melihat afiliasi politik masyarakat Desa Kuala Trang yang mayoritasnya suku Jawa dalam pilkada mendukung Partai Aceh (PA), maka dirasa perlu dilakukan penelitian dengan judul “Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017 (studi kasus di desa Kuala Trang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana afiliasi politik suku Jawa dalam pilkada Nagan Raya 2017?
2. Apa yang mempengaruhi terjadinya afiliasi politik terhadap partai atau calon peserta pilkada?

⁸Wawancara dengan Sugino Timses dari Partai Aceh, pada 05 Juni 2018

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana afiliasi politik suku Jawa dalam pilkada Nagan Raya 2017.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi terjadinya afiliasi politik terhadap partai atau calon peserta pilkada.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang sosial khususnya kajian sosiologi politik. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian terkait waktu mendatang.
2. Secara praktis yaitu memberi bahan masukan bagi pihak yang terkait dengan penelitian mengenai masalah afiliasi politik suku Jawa dalam pilkada Nagan Raya.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kerancuan pengertian dalam skripsi ini, penulis perlu memberikan pengertian, penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, istilah-istilah tersebut ialah :

1. Afiliasi

Afiliasi adalah pertalian atau perhubungan sebagai anggota atau cabang. Jika diibaratkan sebagai dua orang, maka antara orang yang satu

dengan orang yang lainnya saling memiliki hubungan. Hubungan yang didasari saling membutuhkan untuk mencapai tujuan.

Afiliasi menurut Poerwadarwinta (1986), adalah penggabungan, perkaitan, kerja sama, penerimaan sebagai anggota (suatu golongan masyarakat atau perkumpulan).

Stanley (dalam Gellerman, 1984) menyatakan bahwa, afiliasi merupakan keinginan untuk bersatu dengan orang lain tanpa memperdulikan apapun kecuali kebersamaan yang jelas dapat diperoleh.⁹

2. Politik

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik menurut Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.¹⁰

Menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk megakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.¹¹

Menurut F. Isjwara, politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.¹²

⁹<http://www.rijal09.com/2016/04/pengertian-motivasi-berafiliasi.html?m=1> ,diakses tanggal 05 maret 2018

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT. Gramedia Utama, Tahun 2009),hal.13.

¹¹Kartono Kartini, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandiri Maju, 1996), hal. 64.

¹²Isjwra F. *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1995), hal. 42.

Dengan pengertian politik seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka politik dapat dipahami sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), dan Negara (*state*).

3. Suku Jawa

Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.¹³

Menurut Koentjaraningrat, suku bangsa ialah sekompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya akan identitasnya tersebut, kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya diperkuat dengan kesatuan bahasa.

Menurut Hasan Shadily MA, memaparkan bahwa suku bangsa “etnis” ialah merupakan segolongan rakyat yang dianggap memiliki hubungan biologis.¹⁴

4. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangskerta, dhesi yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah

¹³Smith, Anthony D, “*The Ethnic Origins of Nations*” (Blackwell, 1987), hal. 14

¹⁴<http://www.grup pendidikan.co.id/9-pengertian-suku-bangsa-menurut-para-ahli-terlengkap/>, di akses pada tanggal 5 maret 2018

tangganya berdasarkan hak asal-asul dan adat istiadat yang diiakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Wdjaja dalam bukunya berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.¹⁶

Menurut R.Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹⁸

¹⁵Widjaja HAW, “*Pemerintahan Desa/Marga*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.3.

¹⁶Soetardjo Kartohadikoesoemo, “*Desa*”, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984). hal. 280.

¹⁷R.Bintaro, “*Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*“, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal. 4

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal.2.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi, terlebih dahulu penulis akan melakukan tinjauan pustaka sebagai rangkuman referensi atau acuan yang akan di rujuk penulis dengan karya-karya ilmiah lain, jurnal-jurnal terlebih dahulu, agar tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Lucky Dhandy Yudha Kusuma dengan judul “*Afiliasi Politik Kiai Nahdlatul Ulama Dalam Pemenangan Pasangan Iisyad-Gagah Pada Pilkada Kabupaten Pasuruan 2013*”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola interaksi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dengan warga nahdliyin, pola interaksi politik Kiai NU dengan DPC PKB Kabupaten Pasuruan serta hal yang melatar belakangi Afiliasi Kiai NU dengan pasangan calon Irsyad Yusuf dan Riang Kulup Prayuda pada Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2013. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori patronase dan konsepelite agama dalam konteks politik untuk menganalisis. Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisa data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.¹⁹

Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan warga nahdliyin dengan Kiaimasih bersifat patron-klien yang kuat. Kiai merupakan elit NU yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat dan santri, keduanya memiliki hubungan patron-klien. Kedua hubungan politis Kiaidan PKB

¹⁹http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=316783, di akses pada tanggal 7 Juni 2018

terbentuk sebagai konsekuensi kesadaran kritis kiai dalam menanggapi dinamika politik dan menjadikan PKB sebagai aspirasi politiknya. Hal ini juga didukung Khittah 26 yang membebaskan kiai dalam menentukan arah politiknya. Kiai tidak dapat memenuhi kepentingannya tanpa menjalin komunikasi dengan elit lain yang memiliki akses politik. Ketiga terdapat 5 faktor yang melatarbelakangi kiai NU dalam berafiliasi dengan pasangan Irsyad-Gagah. Pertama, kedua pasangan tadi dianggap paling mewakili kultur Nahdlatul Ulama. Kedua, terakomodasinya visi-misi dakwah dan pendidikan Nahdlatul Ulama dalam visi-misi pasangan ini. Ketiga, adalah kedua pasangan tadi merupakan tokoh yang sangat terkenal didomisilinya masing-masing. Keempat, elektabilitas Irsyad- Gagah yang dinilai relatif bersih dibandingkan dengan calon lainnya. Faktor yang terakhir adalah faktor trah darah biru dari seorang Yusuf-Irsyad. Keterlibatan Kiai NU dalam tim pemenangan Irsyad-Gagah adalah bersifat pribadi dan bukan sikap institusi (NU).²⁰

2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Suci Iman Akbar dan Khairulyadi (Program Studi Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah dengan judul “*Sosialisasi dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik*”.

Sosialisasi merupakan bagian dari kajian politik dalam pengertian proses. Oleh karenanya, pengertian sosialisasi senantiasa berkaitan dengan segenap proses politik dalam kehidupan, sosialisasi politik ditentukan oleh

²⁰Journal.unair.ac.id , hal.1

lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Afiliasi merupakan salah satu cara merekrut anggota kelompok dengan cara memanfaatkan sosialisasi secara terarah yang dilakukan oleh individu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat proses sosialisasi dengan afiliasi yang menimbulkan kecenderungannya itu mahasiswa bergabung dan berpartisipasi terhadap partai politik tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi terdiri dari 4 orang mahasiswa aktif pada organisasi internal dan 4 orang mahasiswa yang aktif pada organisasi eksternal dan satu orang responden kunci yaitu wakil rector bidang kemahasiswaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah proses yang diawali dengan upaya partai politik dalam mensosialisasikan ideologi partai dengan melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui sebuah komunikasi yang terjalin dari hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga terjalin ikatan yang memberikan makna dan nilai dari partai politik kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki ketertarikan untuk bergabung kepada partai politik tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya sosialisasi maka mempengaruhi mahasiswa untuk berafiliasi terhadap partai politik tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan kepada partai politik untuk dapat memberikan pola sosialisasi yang baik kepada mahasiswa agar nantinya dapat benar-benar membentuk karakter mahasiswa yang memiliki integritas kepemimpinan sehingga ketika menjadi pemimpin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.²¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Abdul Hakim (Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Seberang Maret Surakarta) dan Helly P. Soetjipto (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada). Judul yang ditulis peneliti yaitu "*Nilai dan Afiliasi Partai Politik*".

Tujuan dalam penelitian ini untuk melihat pola relasi antara karakteristik nilai yang menjadi prioritas individu dengan pilihan partai politik dalam pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai berperan saat individu memutuskan partai apa yang akan didukung. Sementara temuan lainnya menunjukkan bahwa para pendukung partai berbasis agama cenderung lebih religius dibandingkan pendukung partai berbasis kebangsaan.

Namun secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pendukung semua partai didominasi oleh nilai hedonism. Apabila partai yang didukung berhasil mempengaruhi kebijakan publik, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hedonis yang mencakup pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik. Situasi ini menyebabkan partisipasi politik di Indonesia rawan terhadap intervensi politik uang. Bila

²¹Suci Iman Akbar, Khairulyadi, "*Sosialisasi Dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Tahun 2017, Vol.4, No.4, hal.75

hal ini dibiarkan, maka akan mengancam proses demokrasi yang sehat. Sebab, proses politik yang dilandasi oleh nilai hedonis hanya akan didominasi oleh partai yang memiliki kekuatan finansial yang paling besar, bukan partai yang secara rasional paling terpercaya untuk mengolah pemerintah.²²

4. Wira Yudha Alam dengan judul "*Aktivisme Organisasi Mahasiswa EkstraKampus dalam Pemilihan Umum Raya*". mahasiswa Fisip Unair.

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa merupakan salah satu pintu terciptanya pergantian kepemimpinan ditingkat mahasiswa. Pada realitasnya pemira yang seharusnya menjadi ruang bagi seluruh mahasiswa ternyata didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki afiliasi politik terhadap organisasi mahasiswa ekstra kampus terutama yang berbasisan Idiologi Islam. Sebut saja PMII, KAMMI, HMI merupakan organisasi ekstra kampus yang ikut serta dalam perebutan kekuasaan untuk wadah aktualisasi kadernya dan pelebaran sayap organisasi dengan memenangkan BEM maupun BLM.²³

Temuan data yang telah diperoleh adalah koalisi antar organisasi mahasiswa Islam ekstra kampus dibangun dengan saling membantu untuk pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemira sehingga setiap organisasi memiliki partai yang berbeda untuk menggalang suara sebanyakya.

²²Moh. Abdul Hakim, Helly P. Soetjipto, "*Nilai Dan Afiliasi Partai Politik*", Wacana Jurnal Psikologi, Tahun 2014, Vol.6, No. 11, hal. 35-52

²³Moh. Abdul Hakim, Helly P. Soetjipto, "*Nilai Dan Afiliasi*,... hal 35

Organisasi mahasiswa Islam ekstra kampus berkoalisi dikarenakan ketidakpuasan terhadap status quo yaitu GMNI karena tidak mengakomodasi kepentingan organisasi mereka dan adanya kesadaran politik bila tidak koalisi maka tidak akan ada peluang untuk menang. Tidak ada pengaruh yang signifikan karena yang aktif dan memegang posisi penting seperti presiden, wakil presiden dan menteri BEM adalah kader organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Keterlibatan organisasi mahasiswa Islam ekstra kampus dalam pemilihan umum raya mahasiswa sebagai upaya eksistensi dan juga merebut wilayah aktualisasi bagi anggota- anggotanya. Akibatnya mahasiswa yang notabene tidak memiliki afiliasi terhadap salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus tidak mendapatkan ruang untuk berkompetisi. Ketiga, Polakoalisi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Islam ekstra kampus merupakan koalisi ideologis. Walaupun koalisi tersebut adalah tindakan kompromi masing-masing organisasi untuk memenangkan pemilihan umum tetapi persamaan ideologi menjadi pen jembatan untuk bertemunya visi dan misi yang ingin dicapai bersama.²⁴

Berdasarkan beberapa tulisan diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang berjudul Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017 sehingga penulis menarik menulis untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang sosial politik yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

²⁴Wira Yudha Alam, “Aktivisme Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus dalam Pemilihan Umum Raya”, Jurnal Politik Indonesia, Tahun. 2012, Vol.1, No.2, hal. 91-98

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Afiliasi Politik

Kata afiliasi politik berasal dari kata Affiliate atau Affiliation. Afiliasi politik didefinisikan sebagai penggabungan dari dua kelompok yang berlainan anggotanya yang kemudian menggabungkan diri menjadi satu.²⁵

W. Surya Endra juga mengemukakan bahwa afiliasi politik berasal dari kata Affiliate yang mempunyai pengertian yang memasukkan menjadi anggota.²⁶ Selanjutnya beliau mendefinisikan afiliasi politik sebagai penggabungan antara dua kelompok kepentingan atau lebih untuk suatu tujuan politik tertentu. Afiliasi politik pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi:²⁷

1. Afiliasi politik yang bersifat defensive, yang mempunyai tujuan untuk membela diri terhadap serangan dari luar.
2. Afiliasi politik yang bersifat offensive, yang bertujuan untuk menyerang.

Afiliasi politik yang bersifat defensive, menjelaskan bahwa bergabung atau berhubungannya suatu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan yang lain bertujuan untuk mendapatkan perlindungan. Biasanya bentuk kerja sama yang diadakan hanyalah bersifat situasional, dalam pengertian kerjasama hanya terjalin selama kepentingan kedua belah pihak masih dapat terjaga. Tetapi apabila kepentingan sudah terabaikan, hubungan yang telah terjalin tersebut tidak segan-segan untuk dibubarkan. Dengan kata lain lama tidaknya suatu kerjasama akan tergantung pada

²⁵Amir Taat Nasution, *Kamus Politik*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 11

²⁶W. Surya Endra, *Kamus Politik serta penjelasannya*, (Surabaya: Study Group, 1979), hal.

²⁷W. Surya Endra, *Kamus Politik*, hal. 23

kesediaan kelompok kepentingan tertentu untuk melindungi kelompok kepentingan lainnya.

Sedangkan afiliasi yang bersifat offensif, adalah bahwa hubungan yang terjalin dimaksud untuk menyerang atau mempengaruhi. Agar pihak lain yang diserang atau dipengaruhi tersebut mau bergabung untuk mendukung kepentingan-kepentingan pihak yang mempengaruhinya. Afiliasi politik yang bersifat offensif ini biasanya tidak hanya berlaku untuk dua kelompok kepentingan saja, tetapi bisa lebih. Bahkan setiap ada peluang yang dianggap menguntungkan selalu dikejarinya.²⁸

Tetapi dalam penelitian ini afiliasi politik hanya sebagai kecenderungan memilih dari perorangan atau sekelompok orang dari golongan etnis suku Jawa dalam pemilihan 1 kepala daerah tahun 2017 di Nagan Raya secara langsung untuk mendukung menyalurkan aspirasinya atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses suksesnya seorang calon bupati dan wakil bupati atau dengan kata lain masuk dalam tim sukses dari salah satu pasangan tersebut.

Dengan demikian afiliasi politik dalam konsep tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan politik. Tindakan politik tersebut dipengaruhi oleh empat factor. *Pertama*, lingkungan sosio-politik tidak langsung seperti system politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan komunikasi. *Kedua*, lingkungan sosio-politik langsung yang dipengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang seperti keluarga, sekolah, agama dan kelompok permainan. Dalam lingkungan inilah seseorang mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap seseorang. Dan *keempat*, faktor sosio-politik langsung berupa

²⁸W. Surya Endra, *Kamus Politik*, ...hal. 23

situasi, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang pada saat melakukan kegiatan politik.²⁹

B. Teori Patron-Klien

1. Pengertian Patron-Klien

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh.³⁰ Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.³¹

Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended family.³² Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak

²⁹Priyatmoko, *Aspirasi Politik, Afiliasi Politik Orang Tua dan perilaku memilih kaum Muda Kota Surabaya*, (Surabaya: Airlangga Press 1991), hal.

³⁰Usman, Sunyoto, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIRed), 2004),

³¹James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hal. 41. Juga dalam: David Jarry and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hal. 458

³²Jackson, Karl D, *Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat*. Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta, 1981), hal. 53

politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron.³³

Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas, maka kemudian terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar yang diajukan oleh teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

C. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menekankan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Atau dengan kata lain pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial.³⁴ Kontek sosial yang dimaksud adalah berupa identitas atau karakteristik sosial yang melingkupi seseorang sebagai individu bebas. Karakteristik atau identitas sosial seperti; pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Dan karakteristik atau latarbelakang sosiologis seperti; suku, agama, wilayah, umur dan sebagainya merupakan faktor

³³James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), Edisi Pertama, hal. 7-8

³⁴Ramlan Subakhti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hal. 21

penting dalam menentukan pilihan politik.³⁵ Sehingga pemahaman terhadap pengelompokan social baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi, suku, dan sebagainya maupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan suatu yang sangat vital dalam memahami pilihan politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi ataupun afiliasi politik seseorang atau lembaga.³⁶

Ketika mencoba menghubungkan antara keanggotaan dalam suatu kelompok dengan perilaku politik seseorang menyederhanakan kelompok social itu kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok kategori.³⁷ Kelompok primer (*primer group*) merupakan kelompok yang biasanya bertemu secara teratur dan bertemunya secara langsung. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah anggota keluarga, kelompok pertemanan dan lainnya. Kelompok sekunder (*secondary group*) adalah sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi tertentu yang memiliki atribut atau identitas tertentu, yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok profesional, kelompok religi dan kelompok buruh. Kelompok ini biasanya merupakan organisasi formal. Sedangkan kelompok kategori (*categoric group*) adalah kelompok yang keanggotaannya memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan identifikasi. Biasanya tidak berwujud dalam organisasi formal. Tujuannya biasanya digunakan untuk mengklarifikasikan masyarakat. Misalnya kelompok dibawah umur 30 tahun dan sebagainya.³⁸

³⁵Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Memilih*, Jurnal Ilmu Politik No. 16, Jakarta, 1996

³⁶Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan*,

³⁷Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan*.

³⁸Dean Jaros, *Political Behavior Choicc and Prespective*, (London st, Martin's Press inc, 1974) dalam skripsi Badrul Laili, *Afiliasi Politik Elite NU*. Hal 45

D. Partai Poitik

Politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Sejarah keberadaan partai politik di Indonesia dimulai ketika Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1912 dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya partai politik di Indonesia yaitu Boedi Utomo. Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama³⁹.

Menurut UU No.2 Tahun 2011 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

³⁹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar...* hal. 160

⁴⁰Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.⁴¹ Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.⁴² Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.

Dari pengertian di atas maka penulis menggambarkan bahwa partai politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan –

⁴¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hal. 161

⁴²Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1998) hal.

kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁴³

b. Sebagai Sarana Sosialisai Politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

c. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

d. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader -kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader.

E. Strategi Politik

⁴³<http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html> diakses pada tanggal 07 Maret 2018

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *strategos*⁴⁴ yang diartikan sebagai keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibutuhkan pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya.⁴⁵

Strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen, kata strategi yang biasa digunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda. Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.⁴⁶

Strategi adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara stakeholder utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.⁴⁷ Strategi dalam pengertian sempit maupun luas

⁴⁴wikipedia

⁴⁵Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal.13

⁴⁶Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.148

⁴⁷Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 1

terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁸

Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik setidaknya harus mengandung empat hal yakni, (1) ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) ditujukan kepada jumlah khalayak sasaran yang besar (3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan (4) dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon kepala daerah yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan kepala daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Strategi politik pada hakekatnya adalah tindakan yang bersifat goal oriented. Pada kegiatan strategi politik selalu ada tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan melalui tindakan yang seadanya, melainkan harus didasari pengorganisasian tindakan secara sistematis dan strategis. Hal senada juga diungkapkan oleh Nursal yakni: "Pada dasarnya political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang

⁴⁸Nasution, Noviantika, *Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik*, (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), hal. 43

dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.⁴⁹

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstanta tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.⁵⁰

Pembentukan makna-makna politis tersebut dapat dilaksanakan melalui metode: Party, Pass Marketing, Person, Policy, Positioning.⁵¹

1. *Party* juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai politik mempunyai identitas utama, asset reputasi, dan identitas estetis. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihannya. Dalam hal ini partai politik menguatkan insitusional secara internal melalui konsolidasi partai, lalu penguatan eksternal di masyarakat.
2. *Pass Marketing*, strategi politik yang dilakukan memasarkan produk politik untuk mengumpulkan kekuatan dari pihak pihak lain untuk bersama sama

⁴⁹Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.23

⁵⁰Adman Nursal, *Political Marketing...*, hal. 295

⁵¹Oman Heryaman, *Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi...* hal.

bergabung mewujudkan tujuan dari produk politik tersebut, ini biasa sering kali di kaitakan dengan koalisi partai.

3. *Person* adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih melalui Pemilu. Kualitas person dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni kualitas instrumental, dimensi simbolis, dan fenotipe optis.
4. *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. Policy yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yakni meraiik perhatian, mudah terserap pemilih, attributable. Ini substansi produk politik disajikan. Presentasi sangat penting. karean dapat mempengaruhi makna pemilih. Presentasi disajikan dengan medium presentasi. Produk politik disampaikan kepada pasar politik, baik penyampaian produk langsung kepada masyarakat maupun penyampaian produk melalui pemanfaatan media massa.
5. *Positioning* adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar konstestan mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap konstestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif.⁵²

F. Pergeseran Nilai-Nilai Politik

Theodorson mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam teori Rokeach, nilai dalam psikologi

⁵²Oman Heryaman, *Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi*,... hal.

lintas budaya antara lain: Teori Rokeach memandang nilai sebagai suatu keyakinan yang relatif stabil dalam perwujudannya dapat di jadikan menjadi dua kategori yaitu:

a. Nilai Instrumental

Nilai sebagai alat atau instrumental dapat bersifat dua macam yaitu sebagai nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan intrapersonal terhadap hati nurani. Sedangkan sebagai nilai kompetensi atau aktualisasi diri adalah nilai instrumental yang fokusnya lebih bersifat pribadi dan tidak terlalu kelihatan berkaitan langsung dengan moralitas. Jika terjadi pelanggaran terhadap nilai kompetensi akan berakibat adanya perasaan malu karena ketidak mampuan diri.

b. Nilai Terminal

Di bagi menjadi dua macam yaitu bersifat pribadi yaitu nilai di pusatkan pada diri sendiri dan bersifat sosial yaitu nilai yang di pusatkan pada masyarakat.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan cara apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah kajian tentang Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagari Raya 2017(studi kasus di Desa Kuala Trang)yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.⁵³Jenis penelitian ini dipilih karena informasi dan data yang dicari melalui penelitian lebih banyak mempelajari studi kasus dan dukungan referensi. Untuk itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dokumentasi (kepuustakaan),observasi dan wawancara.Observasi dilakukan sebagai upaya untuk mengenal terlebih dahulu responden sebelum wawancara mendalam dilakukan, sehingga penulis mendapatkan data yang sebenarnya untuk diolah dalam penulisan skripsi.

⁵³Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu.Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 5.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Dipilihnya Desa Kuala Trang dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan desa yang mayoritas penduduk suku Jawa.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung tanpa perantara, adapun yang menjadi data primer sekaligus objek penelitian,⁵⁴ adalah masyarakat Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu dari buku-buku, catatan, dokumen-dokumen, jurnal dan karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan judul Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagan Raya 2017 (studi kasus di Desa Kuala Trang) yang dijadikan sebagai data pendukung untuk mengisi kelengkapan bahan tulis⁵⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono mengatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tinjauan dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶

⁵⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134.

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 53.

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 50

Memperoleh data yang dikumpulkan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut,⁵⁷ dalam penelitian ini, data yang diambil dari Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagan Raya 2017 (studi kasus di Desa Kuala Trang).

b. *Interview* (Wawancara)

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh dari terwawancara (*interviewee*),⁵⁸ yaitu proses tanya jawab dalam penelitian langsung secara lisan dengan Masyarakat Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) yaitu subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula apa maksud wawancara. Untuk itu instrumen yang digunakan adalah berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan untuk mengungkapkan data secara kualitatif. Data kualitatif bersifat lebih luas dan dalam mengingat data ini digali oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup.⁵⁹

c. Dokumentasi

⁵⁷Kristi Poewardari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983), hlm. 62.

⁵⁸Siharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 144.

⁵⁹Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.129-138.

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagan Raya 2017 (studi kasus di Desa Kuala Trang).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisa data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁰

Penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.⁶¹

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan.

6. Sistematika Pembahasan

Lebih memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian ...*, hal.218.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 222.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan agar lebih teratur dan jelas dalam memaparkan tujuan penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang menuliskan gambaran umum Afiliasi Politik di Indonesia dan menggambarkan bagaimana Afiliasi politik dalam pilkada di Indonesia.

Pada bab yang ke tiga penulis menggambarkan tentang metodologi penelitian, agar penelitiannya terarah dan mudah untuk dipahami oleh penulis sendiri khususnya dan umumnya oleh semua pembaca.

Bab ke empat adalah bab inti dari pembahasan skripsi yang menjelaskan hasil penelitian tentang Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada 2017. Dan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian.

Dan terakhir bab kelima dimana bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini peneliti juga mengajukan saran yang menyangkut masalah yang di bahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Wilayah Kabupaten Nagan Raya

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitive berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan telah ditetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, kedudukan Kabupaten Nagan Raya berada pada titik koordinat antara 030.40'-04038' Lintang Utara (LU) dan 960.11-96048' Bujur Timur (BT). Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya mencapai 3.363,72 kilometer persegi (km²) atau setara 5,86persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²).⁶²

Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, merupakan peluang strategis yang harus didayagunakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat akan berusaha keras menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan. Sedangkan posisi Nagan Raya yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Gayo Lues, memungkinkan kemitraan lintas

⁶²BPS Nagan Raya Tahun 2016

daerah dalam menjalin transaksi perdagangan komoditas hasil pertanian, industry pengolahan, pariwisata, jasa, dan lainnya.

Sementara itu, posisi Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai baratselatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara. Untuk mewujudkan peluang tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjajaki kerja samadengan PT. Pelindo untuk membangun pelabuhan laut multi purphose di Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur. Hal ini juga didukung dengan potensi sumber daya pesisir dan kekayaan laut yang cukup besar yang apabila dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan (Sustainable development) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama nelayan di pesisir dan mendorong kemajuan wilayah pesisir.⁶³

2. Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya awal mulanya ditandai dengan plantikan Pj. Bupati yaitu tepatnya tanggal 22 juli 2002 dan tanggal itu pula sekarang dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Nagan Raya. Pada saat tersebut Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 5 kecamatan Induk yaitu Kecamatan Beutong, Seunagan Timur, Seunagan, Kuala dan Darul Makmur. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk menigkatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, sampai saat ini telah dimekarkan kecamatan menjadi 10 kecamatan yang di bagi dalam 27 kemukiman dan 222 Gampong/ Desa dan lembaga

⁶³BPS Nagan Raya Tahun 2016

Eksekutif yang ada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, secara susunan organisasi tahun 2012 terdiri dari 16 Dinas, 14 Lembaga teknis (badan dan kantor). Desa Kuala Trang yang menjadi objek lokasi penelitian ini termasuk ke dalam Kecamatan Kuala Pesisir.⁶⁴

Diawal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Pusat Pemerintahan di terletak di Jeuram Kecamatan Seunagan. Hal ini disebabkan Komplek Perkantoran Suka Makmue belum selesai pembangunannya dan pada Tahun 2008 Pusat Pemerintahan baru mulai pindah ke lokasi yang saat ini kita berada. Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan uadang – undang atau peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan suatu apresiasi teritnggi dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 4 kali berturut – turut yaitu sejak tahun 2008-2011. Dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah dan seluruh masyarakat Nagan Raya karena dari sekian banyak kabupaten yang ada di pesisir barat Provinsi Aceh, hanya Nagan Raya yang mampu mendapatkan predikat tersebut.

3. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada awal terbentuknya tahun 2002 berjumlah 142.519 jiwa. Angka tersebut naik drastis hingga mencapai 145.108 jiwa pada tahun 2004, atau rata – rata naik 0.60 persen/tahun. Namun, pasca tsunami

⁶⁴BPS Nagan Raya Tahun 2016

penduduk Nagan Raya menurun yaitu hanya tinggal 124.340 jiwa. Penurunan ini diyakini akibat bencana tsunami, di samping disinyalir sebagian kecil penduduk telah berpindah ke tempat lain, sedangkan pada tahun 2010 penduduk Nagan Raya tercatat berjumlah 139.663 jiwa dan pada tahun 2011 penduduk Nagan Raya berjumlah 142.861 jiwa.⁶⁵

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Dari 26,22 persen pada tahun 2009 turun menjadi 23,38 persen pada tahun 2011. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pendapatan pada tahun 2011 sejumlah 66.339 orang sehingga angka tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,44 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 4,74 persen atau sebesar 4.732 orang. Dari angka tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya sangat banyak dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan atau menciptakan lapangan kerja yang memadai sehingga diharapkan akan mengurangi angka pengangguran.⁶⁶

B. Budaya Politik Suku Jawa

Kaidah dasar dalam kehidupan masyarakat Jawa seperti prinsip rukun dan hormat tidak hanya tertuang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sikap seperti ini juga tercermin di dalam bidang politik. Sehingga konsep budaya politik Jawa, muncul sebagai sebuah identitas pribadi etnis Jawa. Yahya Muhaimin dalam tulisannya “Persoalan Budaya Politik Indonesia” mengutarakan tentang sikap-sikap

⁶⁵BPS Nagan Raya Tahun 2016

⁶⁶BPS Nagan Raya Tahun 2016

masyarakat Jawa terkait dengan pelaksanaan politik di Indonesia. Adapun sikap-sikap itu antara lain.⁶⁷

1. Konsep “Halus”

Masyarakat Jawa cenderung untuk menghindarkan diri atau cenderung untuk tidak berada pada situasi konflik dengan pihak lain dan bersamaan dengan itu mereka juga cenderung selalu mudah tersinggung. Ciri-ciri ini berkaitan erat dengan konsep “halus” (alus) dalam konteks Jawa, yang secara unik bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *subtle*, *sensitive* dan *civilized*. Konsep ini telah ditanamkan secara intensif dalam masyarakat Jawa sejak masa kanak-kanak. Ia bertujuan membentuk pola “tindak-tanduk yang wajar”, yang perwujudannya berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan kasar, *rough*, *vulgar*, *impolite* dan *uncivilized* (ora njawa). Nilai-nilai semacam ini menyebabkan orang Jawa kelihatan cenderung mempunyai konsepsi tentang “diri” yang dualistis.

Sebagai manifestasi tingkah laku yang halus, kita mengenal dua konsep yang bertautan, yaitu “malu” dan “segan”. Yang pertama berkonotasi dari perasaan *discomfort* sampai ke perasaan *insulted* atau rendah diri karena merasa berbuat salah. Yang kedua, “segan”, mirip dengan yang pertama tapi tanpa perasaan bersalah. Rasa segan (*sungkan*). Ini merupakan perpaduan antara malu dan rasa hormat kepada “atasan” atau pihak lain yang setara namun belum dikenalnya dengan baik.

⁶⁷Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti 1991), hal. 53-58

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami mengapa orang Jawa mempunyai kesulitan untuk berlaku terus terang. Ini terjadi karena ia ingin selalu menyeimbangkan penampilan lahiriah dengan suasana batinnya sedemikian rupa sehingga dianggap tidak kasar dan tidak menganggap keterbukaan sebagai suatu yang terpuji kalau menyinggung pihak lain. Untuk itu seorang lawan bicara mesti memiliki sensitivitas tertentu karena ketiadaan sensitivitas akan sering mengakibatkan suatu hasil yang jauh dari yang dimaksudkan.⁶⁸

2. Menjunjung Tinggi Ketenangan Sikap

Sikap ini merupakan refleksi tingkah laku yang halus dan sopan. Pola ini merupakan pencerminan kehalusan jiwa yang diwujudkan dengan pengendalian diri dan pengekangan diri. Kewibawaan ini bisa tercapai dengan bersikap tenang di muka umum, yaitu dengan memusatkan kekuatan diri. Ini berarti bahwa pribadi yang berwibawa adalah pribadi yang tenang, tidak banyak tingkah dan karenanya tidak akan selalu mulai melakukan manufer. Sebagai seorang yang berwibawa, dalam tingkat pertama, ia merasa tidak akan membutuhkan orang lain, sebaliknya orang lain yang selalu membutuhkannya. Karena itu, ia akan selalu merasa perlu membuat jarak dengan orang lain. Karakteristik inilah yang merupakan pola kultural bahwa tindakan dan tingkah laku akan mengakibatkan resiko tertentu yang tidak baik bila tindakan tersebut tidak didasarkan pada ketenangan jiwa atau didasarkan pada pamrih, ketidaktulusan dan penuh emosi.

⁶⁸Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politi*, ... hal. 57

Pola ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa menganggap orang yang berwibawa tidak perlu berarti orang yang aktif atau orang yang memecahkan berbagai persoalan rutin sehari-hari atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan sehari-hari, bukan a man of action. Orang yang berwibawa adalah orang memiliki status tertentu sehingga merupakan objek loyalitas dan kepatuhan pada orang lain. Bertalian dengan pola ini, maka terdapat suatu kecenderungan pada orang Jawa agar kelihatan lebih penting menghargai simbol daripada substansi dan menghargai status daripada fungsi seseorang.

3. Konsep Kebersamaan

Dalam kebudayaan Jawa, kebersamaan ini secara operasional tidak sekedar diaktualisasikan dalam aspek-aspek yang materialistis, tapi juga dalam aspek-aspek yang non materialistis atau yang menyangkut dimensi moral. Implikasi dimensi yang sangat luas ini ialah kaburnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab seseorang. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka dalam kerangka ini, orang lain akan cenderung berusaha menikmati hak tersebut.⁶⁹ Pihak yang secara intrinsik mempunyai hak juga cenderung membiarkan orang lain ikut menikmatinya. Karena itu, kalau seseorang memiliki kewajiban atau tanggung jawab, maka orang tersebut cenderung ingin membagi kewajiban itu pada orang lain.

Dalam hubungan sosial politik masyarakat Jawa bersifat sangat personal. Di samping itu, terdapat suatu kecenderungan yang amat kuat bahwa dalam masyarakat terdapat watak ketergantungan yang kuat pada atasan serta ketaatan

⁶⁹Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politi...* hal. 57

yang berlebihan pada kekuasaan, sebab status yang dipandang sebagai kewibawaan politik dijunjung begitu tinggi. Semua kecenderungan sosio kultural ini memperkental sistem patron klien yang sangat canggih dalam masyarakat. Dengan sistem seperti ini, keputusan-keputusan dalam setiap aspek diambil untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang dipimpin para “orang bijak” tersebut, yang menurut banyak orang, disebabkan oleh warisan kultural masyarakat pemerintahan tradisional yang bersifat sentralistik.

C. Pandangan Budaya Politik Suku Jawa Dalam Melihat Kekuasaan

Dalam paham Jawa, kekuasaan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan kata kekuasaan itu sendiri sebagai kata terjemahan dari “power”. Kekuasaan adalah ungkapan energi illahi yang tanpa bentuk, yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmos. Kekuasaan bukanlah suatu gejala yang khas sosial yang berbeda dari kekuatan-kekuatan alam, melainkan ungkapan kekuatan kosmis yang dapat kita bayangkan sebagai semacam fluidum yang memenuhi seluruh kosmos.⁷⁰ Artinya bahwa kekuatan-kekuatan itu seperti cairan yang mengisi seluruh alam semesta, tidak terkecuali apapun dan dapat dimiliki oleh siapapun tergantung bagaimana cara seseorang itu memperolehnya.

Di dalam pandangan budaya politik Jawa kekuasaan memiliki aspek pemahaman sendiri yang cukup kompleks untuk dijelaskan, dimana seorang penguasa atau pemimpin memiliki kekuasaan yang cukup besar. Menurut pandangan Jawa pada latar belakang paham kekuasaan itu raja dapat dimengerti sebagai orang yang memusatkan suatu takaran kekuatan kosmis yang besar dalam dirinya sendiri, sebagai

⁷⁰Franz, Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Filosofis Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 99

orang yang sakti sesakti-saktinya kita bisa membayangkan seperti pintu air yang menampung seluruh air sungai dan bagi tanah yang lebih rendah merupakan satusatunya sumber air dan kesuburan. Atau sebagai lensa pembakar yang memusatkan cahaya matahari dan mengarahkannya kebawah.⁷¹

D. Afiliasi Suku Jawa dalam Pilkada 2017

Terwujudnya pilkada 2017 tidak terlepas dari peran dan dukungan setiap element masyarakat di setiap daerah. Meskipun dukungan suara dari daerah terpencil. Desa Kuala Trang bisa dikatakan bukan daerah yang terpencil dan bukan pula daerah yang sudah sangat maju. Namun desa yang terletak di antara ke dua opsi tadi.

Masyarakat suku Jawa yang ada di desa Kuala Trang sangat antusias dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan politik di pemilu 2017. Hal ini tercermin dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan, salah satunya seperti yang dituturkan oleh Bapak Sugino warga desa Kuala Trang, beliau menyebutkan tentang afiliasi suku Jawa di desa Kuala Trang:

Saya sangat mendukung dari semua segi dalam mensukseskan pilkada 2017 dan saya sangat menginginkan dalam proses pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan aman tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun.⁷²

Sukarlan yang juga sebagai Ketua Pemuda desa Kuala Trang mengatakan hal yang sama, kami pemuda sangat mendukung dan proaktif dalam pelaksanaan pilkada 2017 di Nagasari.⁷³

⁷¹Franz, M. G. Suseno, *Etika Jawa Sebuah...*, hal. 100-101.

⁷²Wawancara dengan Agus Suparno, Kepala Desa Kuala Trang pada tanggal 13 Juli 2018

⁷³Wawancara dengan Sukarlan, Warga desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juli 2018

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat desa kuala Trang Khususnya suku Jawa sangat antusias dalam mensukseskan pilkada di Nagan Raya, mereka ingin di Kabupaten Nagan Raya itu tidak ada pemimpin yang membedakan masyarakat suku Aceh dengan suku jawa. Hal itu di ungkapkan oleh Juliansyah putra “kami suku jawa berada di garda depan dalam mensukseskan pilkada 2017, karena kami yang minoritas bias memilih pemimpin yang peduli terhadap minoritas yang ada di Nagan Raya.⁷⁴

Selain berpartisipasi dan mendukung jalannya alur pesta demokrasi tersebut, masyarakat suku Jawa di desa Kuala Trang juga menjaga keamanan dan ketertiban berjalannya kegiatan itu, dan kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya keamanan yang baik di tiap TPS sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KIP Nagan Raya yang berinisial Usman, yaitu: “Dengan jumlah keseluruhan pemilih sekitar 836 orang, maka ada 3 TPS di Desa Kuala Trang,kami selaku KIP bekerja dengan sangat baik dan masyarakat desa Kuala Trang jugasangat membantu, bahkan keamanannya juga terjaga dengan sangat baik dan ketat apalagi disaksikan langsung oleh warga setempat.⁷⁵

Perilaku golput (golongan putih) yang sering dikhawatirkan muncul apalagi di desa kecil seperti Desa Kuala Trang malah tidak muncul.Memang benar, bahwa Golput dinilai sebagai sikap apatis karena dianggap sebagai tindakan tidak peduli pada persoalan politik yang ada.Rosenberg menyebutkan tiga alasan adanya apatis.⁷⁶Alasan pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap

⁷⁴Wawancara dengan Juliansya Putra, warga desa Kuala Trang pada tanggal 15 Juli 2018

⁷⁵Wawancara dengan Usman, Komisioner KIP Kab.Nagan Raya, pada tanggal 12 Juli 2018.

⁷⁶Sudjono Sastroatmodjo, Perilaku Politik, (Semarang: IKIP Semarang, 1995)

beberapa aspek kehidupannya. Alasan kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan control politik. Ketiga yaitu ketidakadaan pesaing politik. Dan ketiga hal yang disampaikan oleh Rosenberg ini tidak terjadi di Desa Kuala Trang.

E. Afiliasi Politik Terhadap Partai atau Calon Peserta Pilkada 2017

Dalam afiliasi politik ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah; tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran tokoh partai, peran kaum intelektual, peran media, dan konflik antara para petinggi politik. Sayangnya para ahli jarang menyebutkan tentang rasionalitas masyarakat dalam menilai. Di desa Kuala Trang masyarakat sudah tidak mudah mendengar seruan manis dalam pilkada, Sugino menjelaskan, masyarakat sudah pandai memilih pemimpin dan tidak bisa lagi di iming-iming dengan janji manis ketika kampanye.⁷⁷ Masyarakat semakin terdidik dan pintar dalam menilai peta politik yang dimainkan setiap pemilu meskipun mereka adalah masyarakat biasa.

Kedekatan masyarakat dengan calon bupati yang mempengaruhi kemenangan dalam pilkada bukan karena banyak uang sehingga suara bisa didapatkan dengan mudah. Faisal mengatakan “saya sangat mendukung salah satu calon bupati yaitu pasangan H.M. Jamin dan Chalidin karena pak Jamin tersebut hidup di lingkungan jawa, beliau juga menguasai bahasa Jawa. Bahkan banyak suku Jawa yang berkerja di PT. Ujung Neubok Dalam (UND) yang juga milik dari bapak H.M. Jamin tersebut”⁷⁸ masyarakat juga menilai calon bupati H.M. Jamin Idham yang diusung dari

⁷⁷Wawancara dengan Sugino, Sekdes desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juli 2018

⁷⁸Wawancara dengan Faisal, Kadus Ir. 2 desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juli 2018

partai Aceh juga pengusaha sukses yang dermawan, sosok yang taat dalam beragama sehingga secara keseluruhan masyarakat desa Kuala Trang mendukung penuh pasangan calon ini dan menang di daerah mereka.⁷⁹

Erwanto mengatakan masyarakat Nagan Raya khususnya desa Kuala Trang menginginkan perubahan roda pemerintahan, karena pada periode sebelumnya H.M. Jamin Idham ini adalah sosok wakil bupati yang dekat dengan masyarakat.⁸⁰

Disamping pasangan calon yang diusung dekat dengan masyarakat, partai politik juga mempengaruhi kemenangan di pilkada Nagan Raya. Partai Aceh adalah partai yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Nagan Raya sehingga pasangan ini bisa memenangkan pilkada 2017 di Kabupaten Nagan Raya.

F. Faktor-faktor Determinan yang mempengaruhi Afiliasi Politik

Afiliasi politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sebagai bagian dari perilaku politik pemilihan. Beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor ekonomi atau pilihan rasional

Meskipun faktor ini secara eksplisit terlihat namun dari sindiran salah seorang tokoh masyarakat jelas terlihat bahwa motif ekonomi tetap memegang peran dalam mempengaruhi afiliasi politik seseorang. “Heriyanto mengatakan untuk apa kita milih pemimpin yang enggak ada untungnya untuk kita, kita pilih saja H.M Jamin Idham

⁷⁹Wawancara dengan, Suriani, Ketua PKK desa Kuala Trang pada tanggal 12 Juli 2018

⁸⁰Wawancara dengan Erwanto, masyarakat desa Kuala Trang pada tanggal 11 Juli 2018

yang di unsung oleh partai Aceh karena dia bisa memberikan pekerjaan untuk kita diperkebunan dia dan dia pun sudah dekat dengan kita (suku jawa)”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui mereka akan mendukung calon yang akan memberikan keuntungan yang paling besar kepada mereka. Dengan demikian pilihan mereka akan cenderung untuk memilih calon yang sebelumnya pernah menjadi wakil bupati pada periode sebelumnya, karena mereka sudah melihat dan kinerjanya sudah dirasakan pada saat dia duduk sebagai wakil bupati, dengan kata lain mereka memilih untuk mencari aman.

Faktor ekonomi atau pilihan rasional ini juga menjelaskan adanya perbedaan pilihan antara satu dengan yang lainnya, atau adanya pergeseran pilihan antara pemilu satu dengan pemilu lainnya. Karena mereka memilih disadari oleh pertimbangan yang sifatnya situasional. Sulis mengatakan “ saya pada pemilihan yang lalu memilih T.R. Zulkarnaini saya melihat ketika itu dia akan memperlakukan kami dengan baik namun setelah terpilih dia tidak begitu peduli terhadap kondisi kami, hanya wakilnya yang peduli namun pada saat itu wakilnya H. M. Jamin tidak bisa berbuat banyak karena kekuasaannya dibatasi oleh bupati tapi pada pilkada ini kami memilih H.M. Jamin yang maju sebagai bupati karena kami yakin dia bisa peduli terhadap kami”⁸²

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa suku jawa lebih memilih calon mana yang akan memberi keuntungan besar bagi mereka sehingga mereka melihat betul calon yang sangat dekat dengan mereka dan jika terpilih nanti akan memberikan manfaat besar bagi mereka.

2. Faktor ideologi/ partai politik

⁸¹Wawancara dengan Heriyanto warga desa Kuala Trang, pada tanggal 11 Juni 2018

⁸²Wawancara dengan Sulis, Mahasiswi asal desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juni 2018

Dalam banyak kasus ideologi seringkali dinamakan dengan partai politik, sebab setiap partai politik memiliki asas pedoman yang berbeda, tergantung apa yang akan dijadikan basis dukungan kelompok mereka, seperti PA, PDA dan PNA dimana partai ini merupakan partai lokal yang sangat kental di Aceh.

Mereka suku Jawa bukan hanya menjadi masyarakat biasa saja tetapi mereka juga bagian dari anggota partai politik sehingga dalam pilihan politik mereka juga dipengaruhi oleh sistem tersebut. Mulyono “kami dari suku Jawa tidak pernah mengintruksikan bahwa semua suku Jawa harus memilih calon dari partai tertentu, terserah mereka mau pilih siapa, kayak saya pada Pilkada lalu saya memilih dari partai Golkar pada Pilkada ini saya memilih dari partai Aceh”⁸³

Badrudin juga menyampaikan “Pilkada ini saya pilih calon yang sudah pengalamannya sudah jelas gimana kerjanya dia makanya saya pilih H.M. Jamin walaupun dulunya diusung oleh partai Golkar sekarang diusung oleh partai Aceh”⁸⁴. Dengan demikian partai atau ideologi merupakan ikatan-ikatan sosiologis yang bisa berubah sewaktu-waktu.

3. Faktor individu sebagai agen atau aktor

Individu pada dasarnya memiliki hak untuk bertindak berdasarkan atau menurut kehendak pribadi. Mereka mempunyai pilihan-pilihan sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam perilaku politik termasuk dalam menentukan pilihan pemimpin untuk daerah masing-masing. Kondisi ini tetap berlaku walaupun individu tersebut tergabung dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan.

⁸³Wawancara dengan Mulyono, Kechik desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juni 2018

⁸⁴Wawancara dengan Badrudin, Imum masjid desa Kuala Trang pada tanggal 10 Juni 2018

Begitu juga dengan individu yang bergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan namun mereka membawa hak-hak individu dalam hal menentukan pilihan dalam perilaku sehari-hari maupun perilaku politik. Dalam perilaku politik harus adanya kebebasan dalam memilih calon bupati dalam pilkada 2017. Mereka tidak bisa dibatasi atau diarahkan untuk memilih calon tertentu. Jalidin mengatakan “kita suku Jawa memang ada persatuan sendiri kayak organisasi juga namun itu cuma wadahnya kita saja, kalau masalah pilihan diserahkan kepada masing-masing individu”.⁸⁵

Faktor yang ketiga ini merupakan faktor yang fleksibel jika dibandingkan dengan dua faktor di atas, sebab disini individu merupakan pelaku bertujuan yang memilih kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga dukungan pada salah seorang calon merupakan bentuk pemenuhan tersebut. Dari faktor ini juga fragmentasi dukungan dapat terbentuk karena masing-masing individu adalah agen bagi dirinya sendiri.

G. Afiliasi Suku Jawa dengan Pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin

Kronologi keterlibatan suku Jawa dalam Tim Pemenangan H.M. Jamin Idham-Chalidin dimulai dengan bergabungnya tokoh suku Jawa khususnya yang ada di desa Kuala Trang untuk memberikan saran solutif kepada partai yang awalnya memang ingin mengusung beberapa calon bupati dari kalangan partai Aceh. Agus Suparno “mengatakan bahwa ada rencana dari beberapa pengurus partai Aceh untuk mengusung Wakil ketua DPRK Nagan Raya yang juga ketua Partai Aceh di wilayah itu untuk menjadi salah satu pasangan calon. Namun dengan berbagai pertimbangan maka

⁸⁵Wawancara dengan Jalidin, warga desa Kuala Trang pada tanggal 9 Juni 2018

partai aceh memutuskan untuk mengusung calon H.M. Jamin Idham-Chalidin sebagai kandidat dalam pilkada 2017 di Nagan Raya.⁸⁶

Terdapat beberapa faktor yang ditemukan oleh peneliti, apa yang membuat pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin dinilai oleh masyarakat suku jawa yang mengungguli empat pasang calon lainnya dan akhirnya memilih merapat dan berafiliasi kepada pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin:

Faktor pertama adalah kedua pasangan calon ini dianggap paling mewakili kultursuku jawa di Nagan Raya. Menilik loyalitas kedua pasangan ini, H. M. Jamin Idham sebagai seorang tokoh yang sangat dekat dengan suku jawa dan juga pengusaha sukses diwilayah tersebut sehingga banyak yang bekerja di perusahaan H.M. Jamin Idham tersebut. Beranjak di tahun 2004 beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Di tahun 2012, H.M. Jamin Idham merupakan wakil Bupati Nagan Raya yang sukses dan sangat dekat dengan masyarakat. Hal inilah masyarakat masyarakat memberi dukungan kepada beliau untuk maju sebagai bupati Nagan Raya pada tahun 2017.⁸⁷

Sedangkan Pasangannya, Chalidin ini merupakan sosok yang gagah yang juga merupakan tokoh masyarakat Nagan Raya yang menetap di Jakarta disana dia sebagai Ketua IKNR (Ikatan Keluarga Nagan Raya) di Jakarta. Dia juga merupakan putra Nagan Raya yang sukses di perantauan sehingga pada pilkada 2017 masyarakat Nagan Raya yang ada di Jakarta meminta dia pulang ke Nagan Raya untuk dicalonkan sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan H.M. Jamin Idham.⁸⁸

⁸⁶Wawancara dengan Agus Suparno, timses H.M. Jamin Idham-Chalidin, pada 13 Juli 2018

⁸⁷Wawancara dengan Mulyadi, Tuha 4 desa Kuala Trang pada tanggal 13 Juli 2018

⁸⁸Wawancara dengan Mulyadi, Tuha 4 desa Kuala Trang pada tanggal 13 Juli 2018

Loyalitas ini didukung dengan komitmen dan tindakan nyata beliau mencoba dapat berafiliasi dengan suku Jawa yang tentu saja beliau memberikan visi-misi yang sesuai dengan keinginan warga suku Jawa. Dan mengembalikan Kabupaten Nagan Raya daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesamaan visi-misi dianggap sebagai faktor kedua yang melatarbelakangi suku Jawa berafiliasi dengan pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin. Visi-misi yang dibawa pasangan Partai Aceh ini dianggap oleh seluruh masyarakat menjadi kunci utama ketersediaan suku Jawa mendukung pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin. Tim pemenangan yang dibentuk oleh pasangan tersebut diberi nama tim JADIN (Jamin Idham-Chalidin) yang mendapat nomor urut lima. Pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin melakukan kegiatan pendekatan terhadap masyarakat suku Jawa dan merangkul semua kalangan masyarakat.⁸⁹

Faktor ketiga adalah pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidin menjadi tokoh yang sangat dikenal masyarakat di daerah domisilinya masing-masing, H. M. Jamin terkenal di wilayah selatan yakni kecamatan Darul Makmur, Tadu Raya, Kuala dan Kuala Pesisir. Sedangkan Chalidin juga tokoh yang sangat terkenal di wilayah barat yakni kecamatan Suka Makmue, Seunagan, Seunagan Timur dan kecamatan Beutong. H.M. Jamin Idham juga dikenal sebagai pengusaha kelapa sawit di Nagan Raya sedangkan Chalidin Pengusaha sukses di ibukota Jakarta.⁹⁰ Terbukti, di daerah masing-masing mereka meraup suara yang signifikan.

⁸⁹Wawancara dengan Agus Suparno, timses H.M. Jamin Idham-Chalidin, pada 13 Juli 2018

⁹⁰Wawancara dengan Mustafa, kader partai Aceh pada tanggal 13 Juli 2018

Faktor keempat adalah elektabilitas H.M. Jamin Idham-Chalidin, keduanya relatif bersih, bisa dibilang tidak ada masalah hukum yang pernah menghampiri keduanya.⁹¹

H. Hasil Pilkada Kabupaten Nagan Raya 2017

Secara umum pelaksanaan Pilkada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya 2017 bisa dikatakan berlangsung sukses dengan aman sampai akhir pelaksanaannya, dan jauh dari berbagai kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada selama proses pemilihan tersebut berlangsung. Berbagai permasalahan yang sebelumnya menghambat KIP Nagan Raya seperti permasalahan DPT dan masalah teknis lainnya sama sekali tidak menjadi hambatan yang berarti sehingga akhirnya KIP Nagan Raya mampu mengadakan Pilkada sebagai mana mestinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, biarpun setelah akhirnya KIP Nagan Raya melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih sesuai Surat Keputusan KIP Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016. Ada beberapa unjuk rasa dan gugatan oleh pihak yang kalah dalam Pilkada tersebut dan menolak hasil keputusan KIP Nagan Raya. Namun terlepas dari itu KIP Nagan Raya tetap menjalankan tugasnya dengan baik.⁹²

Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang dimenangkan oleh pasangan nomor 5 yaitu pasangan H. M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE dengan kemenangan mutlak dan hanya satu putaran saja, dan ini sangat jauh berbeda sekali dengan Pilkada Kabupaten Nagan Raya yang lalu pada tahun 2012 yang dimenangkan oleh Drs. H. T. Zulkarnaini namun membutuhkan 2 putaran.

⁹¹Wawancara dengan Mustafa, kader partai Aceh pada tanggal 13 Juli 2018

⁹²Wawancara dengan Usman, Komisioner KIP Kab.Nagan Raya, pada tanggal 12 Juli 2018.

Kemenangan telak ini dipeoleh oleh pasangan Drs. H. T. Zulkarnainidan H.M. Jamin Idham, SE dengan persentase kemenangan yang cukup tinggi dimana pasangan laninyayaitu pasangan nomor urut 1 TR. Keumangan dan Menter, S. Sos dengan perolehan suara 10.622 suara dengan persentase kemenanganya yaitu (12.49%). Sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 yakni pasangan Drs. H. Asib Amin dan Jasmi Has, MM mendapat perolehan suara sebesar 23.338 suara dengan persentase kemenangan (27.43%) sementara pasangan nomor urut 4 yakni pasangan Samsuardi dan Nurkhalis, SP memperoleh suara sebesar 17.361 dengan persentase kemenangan (20,41%) dan pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Drs. H. T. Zulkarnainidan H.M. Jamin Idham, SE memperoleh suara sebesar 24,506 dengan persentase kemenangan (28.81%).

Dari hasil tersebut kemenangan pasangan nomor urut 5 yaitu pasangan H. M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE tidak terbantahkan lagi mengingat bahwa H. M. Jamin Idham, SE saat ini merupakan calon incumbent yaitu wakil Bupati sebelumnya yang memiliki banyak dukungan tidak hanya dari berbagai partai politik namun juga dari berbagai kalangan ormas, paguyuban dan juga berbagai kelompok kepentingan yang lain sehingga tidak mengherankan apabila kemenangan mutlak di peroleh oleh pasangan ini. ditambah lagi bila dibandingkan dengan Pilkada pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 jumlah kontestan Pilkada calon Bupati Nagan Raya pada tahun 2017 ini jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan Pilkada yang lalu dimana calon peserta Pilkada pada tahun tersebut berjumlah 4 pasang calon Bupati dan wakil Bupati sementara pada tahun 2017 ini jumlah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya berjumlah 6 pasang calon.Maka dari itu kemenangan dalam satu kali

putaran Pilkada sangat memungkinkan bagi setiap pasangan calon Bupati Nagan Raya.⁹³

⁹³Wawancara dengan Usman, Komisioner KIP Kab.Nagan Raya, pada tanggal 12 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini, peneliti telah sampai pada suatu kesimpulan yang pasti setelah meneliti, melakukan observasi dan menerapkan instrumen penelitian lainnya di lapangan, yaitu:

1. Respon masyarakat desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 lalu sangat baik. Masyarakat Desa Kuala Trang antusias dalam menjadi bagian dari pesta demokrasi tersebut. Memang sulit dan jarang mendapati sebuah daerah dengan respon yang demikian, namun seiring dengan waktu, masyarakat tercerahkan untuk memberikan respon positif kepada sesuatu yang juga bersifat positif untuk membangun daerahnya, membangun bangsanya, dan itu juga diawali dengan membangun kesadaran berpolitik yang baik dengan memberikan respon-respon yang baik dalam perpolitikan.
2. Afiliasi politik dalam pilkada 2017 di Nagan Raya dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) Faktor ekonomi atau pilihan rasional (2) Faktor ideologi/ partai politik, dan (3) Faktor individu sebagai agen atau actor.
3. Dalam pilkada 2017 masyarakat Suku Jawa yang ada di desa Kuala Trang pada umumnya mendukung pasangan dari Partai Aceh karena mereka melihat pasangan ini mempunyai kapasitas untuk memimpin Nagan Raya lima tahun yang akan datang, disamping itu juga pasangan ini dekat dengan masyarakat. Hal itu terlihat dari calon bupati yang begitu peduli terhadap suku Jawa yang ada di Kuala Trang dan juga memberikan lapangan kerja kepada mereka.

4. Dalam pilkada 2017 di Nagan Raya suku Jawa yang ada di desa Kuala Trang khususnya mendukung pasangan yang diusung oleh partai Aceh yaitu H.M. Jamin Idham-Chalidi, sehingga hasil pilkada Nagan Raya tahun 2017 dimenangkan oleh pasangan H.M. Jamin Idham-Chalidi, dengan kemenangan mutlak dan hanya satu putaran saja.

B. Saran-Saran

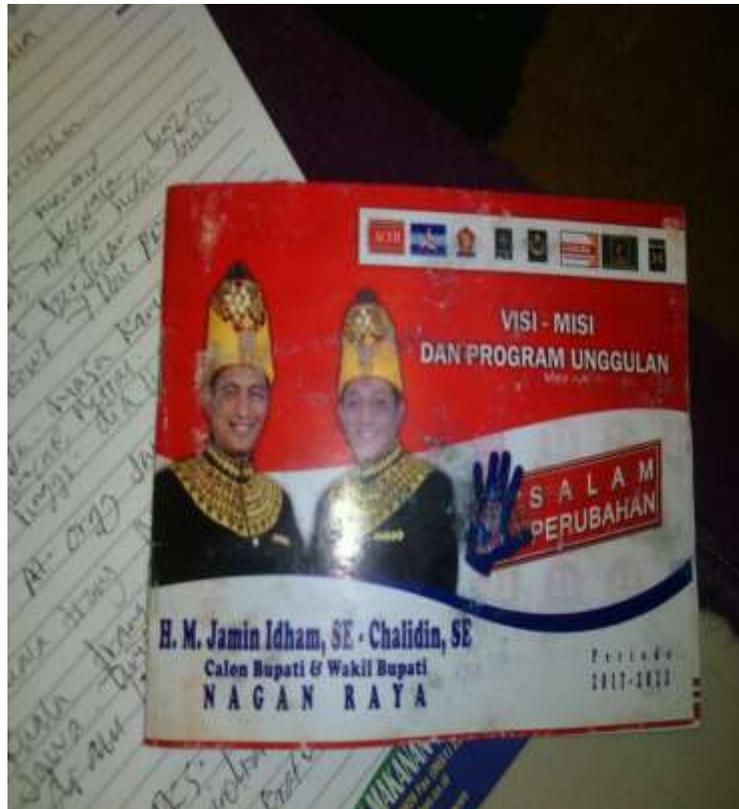
Penulis berharap semoga penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semua, masyarakat Aceh pada umumnya dan rakyat Indonesia secara khususnya, untuk lebih cerdas dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam perilaku dan berafiliasi politik. Karena memilih pemimpin adalah tanggung jawab kita semua yang manfaat serta akibatnya juga akan menjadi bagian diri kita. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, semoga kritik dan saran membangun dapat menjadi penyemangat untuk memperbaiki di waktu yang akan datang. Terakhir, semoga penelitian ini ada manfaatnya dan menjadi bahan kajian untuk peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Amir Taat Nasution, *Kamus Politik*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Fadillah Putra. "*Partai Politik dan Kebijakan Publik*." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fidel Ali Permana, *Pilkada Demokrasi Tidak Mesti Langsung*, Media Indonesia, No. 1, Idris : Agustus 2009, hal. 20.
- Franz, Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* Jakarta: Gema Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1998
- Isjwra F. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1995
- Joko J. Prihatmoko, "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*", Semarang: Pustaka Pelajar, 2000.
- Kartono Kartini, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandiri Maju, 1996.
- Kristi Poewandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, Tahun 2009.

- Moh. Abdul Hakim, Helly P. Soetjipto, “*Nilai Dan Afiliasi Partai Politik*”, Wacana Jurnal Psikologi, Vol.6, No. 11 Tahun 2014.
- MuhammadAlim, “*Demokrasidan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD1945*”, Yogyakarta: UII Press 2001.
- Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Memilih*, Jurnal Ilmu Politik No. 16, Jakarta, 1996.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti 1991.
- Priyatmoko, *Aspirasi Politik, Afiliasi Politik Orang Tua dan perilaku memilih kaum Muda Kota Surabaya*, Surabaya: Airlangga Press1991.
- Ramlan Subakhti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992.
- Siharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suci Iman Akbar, Khairulyadi, “*Sosialisasi Dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Tahun
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: al-Fabeta, 2010
- Widjaja HAW, “*Pemerintahan Desa/Marga*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1990.
- W. Surya Endra, *Kamus Politik serta penjelasannya*, Surabaya: Study Group, 1979.
- Wira Yudha Alam, “*Aktivisme Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus dalam Pemilihan Umum Raya*”, Jurnal Politik Indonesia, Vol.1, No.2, Tahun. 2012.

Gbr.1. Brosur Visi-Misi Paslon no 5, yang diberikan oleh Bapak Erwanto.



Gbr.2. Wawancara kepada Ketua Pemuda Bpk Sukarlan



Gbr. 3 Wawancara dengan Bapak Erwanto (Masyarakat Desa Kuala Trang)



**Gbr. 4. Foto Brosur Paslon No Urut 5 Jadin. Yang diberikan oleh Gbr. Bapak
Erwanto**



Gbr. 5. Foto Paslon yang terpilih di Pilkada Nagan Raya 2017, dalam acara peusijek kemenangan dan terpilihnya Jadin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya. Yang diberikan oleh Bapak Badrudin



Gbr. 6. Foto yang diberikan oleh Bapak Badrudin, dalam rangka Pilkada Nagan Raya



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana pengaruh masyarakat suku jawa dalam pemenangan pilkada Nagan Raya 2017?
2. Sejauhmanakah hubungan masyarakat suku jawa dengan calon kepala daerah yang maju pada pilkada 2017?
3. Faktor apasaja yang mempengaruhi afiliasi suku jawa dalam pilkada 2017?
4. Apakah dalam pemenangan calon kepala daerah dalam pilkada 2017 dipengaruhi oleh suku jawa?
5. Apakah calon kepala daerah mengangkat orang dari suku jawa sebagai timses?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI-ARANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-235/Un.08/FUF/KP.00.4/02/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara

- Muhammad Sahlan, S. Ag, M. Si
- Musdawati, S. Ag., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Novita Gustian Ningsih
NIM : 140305038
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Pola Penyelesaian Konflik Desa dengan Pendekatan Politik (Studi Kasus Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya)

Kedua: Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Darussalam
pada tanggal : 19 Februari 2018
Dekan

Lukman Hakim

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kepala Bsn. Akademik



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-648/Un.08/FUF.I/PP.00.9/03/2018
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Novita Gustian Ningsih**

23 Maret 2018

Yth . Bapak/ Ibu
Camat Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Aceh Barat Daya
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Novita Gustian Ningsih
NIM : 140305038
Prodi : Sosiologi Agama
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Kajhu (Aceh Besar)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagan Raya 2017, Studi Kasus di Desa Kuala Trang"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Maizuddin



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN KUALA PESISIR
GAMPONG KUALA TRANG**

Jln. Kuala Tuha – lamie kode Pos 23661

Nomor : 2009/467/VIII/2018
Lampiran : -
Perihal : *Penerimaan Mahasiswi
Penelitian*

Kuala Trang, 02 Agustus 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry

1. Sehubungan dengan surat nomor :B-648/Un.08/FUF.I/PP.00.9/03/2018 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dengan Perihal Pengantar Penelitian dengan biodata Mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Novita Gustian Ningsih
NIM : 140305038
Prodi : Sosiologi Agama
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Kajhu (Aceh Besar)

2. Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terhitung mulai tanggal 13 Mei 2018 s/d 18 Mei 2018 dengan penelitian / penulisan skripsi tentang “ Afiliasi Politik Suku Jawa dalam Pilkada Nagan Raya 2017” (Studi Kasus di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya).
3. Demikian Surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kec. Gampong Kuala Trang



JUNID ARIYANTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Novita Gustian Ningsih
Tempat /Tgl lahir : Kuala Trang/13 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 140305038
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Jawa
Status : Belum Menikah/Mahasiswa
Alamat :Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir,
Kabupaten Nagan Raya

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Agusmanto
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Nama Ibu : Riyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanya

3. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah SD Negeri Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Tahun Lulus 2008
- b. Sekolah SMP Negeri 8 Kuala, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Tahun lulus 2011
- c. Sekolah SMA Negeri 2 Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Tahun lulus 2014